

MERAJUT HUBUNGAN MILITER

Oleh: Muradi*

Meski mendapat kecaman dari sejumlah aktivis HAM, pemulihan kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara bertahap patut diapresiasi. Apalagi hampir 16 tahun sejak embargo senjata dan kerjasama militer pada tahun 1994, Indonesia praktis jalan ditempat dalam pengembangan postur pertahanan maupun Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan akan Alutsista dan sistem pertahanan pada negara Barat, khususnya AS masih sangat tinggi. Sehingga pembukaan kembali kerja sama militer tersebut menjadi salah satu pintu masuk untuk membuka ruang-ruang baru bagi pengembangan kerja sama militer di masa yang akan datang.

Harus diakui juga bahwa kekuatiran LSM kemanusiaan yang melihat bahwa pemulihan kerja sama ini dapat memberikan efek negatif bagi kampanye kemanusiaan dan anti kekerasan di Indonesia menjadi masuk akal. Apalagi, kerja sama tersebut menitiktekan pada peningkatan kemampuan Kopassus, yang mana di masa lalu banyak melakukan berbagai tindakan pelanggaran kemanusiaan di sejumlah daerah konflik seperti di Aceh, Papua, dan Timor Timur .

Namun demikian, perubahan kebijakan AS terhadap Indonesia berkaitan dengan pemulihan kerja sama militer bukan tanpa alasan. Setidaknya bila mengacu pada progresifitas reformasi di TNI, di mana dalam 11 tahun terakhir, bisa dibilang TNI lebih baik dibandingkan dengan sejumlah institusi bidang keamanan lainnya. Indikasi yang paling kentara adalah berbagai penyimpangan dan pelanggaran kemanusiaan yang kerap terjadi di masa lalu, berkurang drastis. Hal inilah sesungguhnya yang menjadi alasan penegas bahwa secara institusional, TNI telah berada pada jalur yang benar. Sehingga tidak ada alasan bagi AS untuk memperpanjang embargo persenjataan dan kerjasama militer.

Akselerasi Kemampuan Pertahanan

Dalam konteks globalisasi pertahanan (*Defense Globalization*), keberadaan dan posisi Indonesia tetap strategis di mata AS dan negara Barat lainnya. Selain itu, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar makin menguatkan posisi Indonesia dimata AS dan sekutunya tersebut. Pengalaman yang kurang baik ketika melakukan agresi ke Afganistan dan Irak menjadi catatan penting bagi AS dan sekutunya di mana langkah untuk memosisikan musuh negara-negara dengan tingkat radikalisme yang tinggi adalah sebuah kesalahan terbesar. Setidaknya bila melihat efek negatif yang dirasakan dari Perang di Irak dan Afganistan selama ini.

Sementara dari sisi Indonesia, perubahan kebijakan tersebut harus juga dilihat sebagai pemulihan akselerasi kemampuan pertahanan, yang hampir 16 tahun hampir tidak terasah. Ada lima keuntungan bagi Indonesia apabila pemulihan kerja sama militer ini dapat dikembangkan lebih luas lagi, yakni: Pertama, sebagai titik balik bagi pengembangan dan pemulihan kemampuan pertahanan, kerja sama tersebut dapat membuka cakrawala bagi TNI untuk membangun sistem dan postur

* Penulis adalah Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran Bandung. Alamat: Kompleks Margahayu Raya, Jl. Saturnus Utara No. 47, Bandung. Phone/Faks: 022 7561828 Email: muradi_clark@unpad.ac.id, www.muradi.wordpress.com No. Acc BCA: 111-111-0781

pertahanan yang lebih baik agar disegani setidaknya di Asia Tenggara. Hal tersebut sejalan dengan Buku Putih Pertahanan tahun 2008, yang menegaskan bahwa eksistensi militer Indonesia harus dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut berkonsekuensi pada pengamanan pulau terluar dan perbatasan dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Australia.

Kedua, Indonesia juga secara bertahap harus kembali membangun industri strategis yang lama 'mati suri'. Meski alasan utama ada pada kebijakan politik dan ketersediaan anggaran yang memadai, namun harus diakui bahwa embargo tersebut telah pula mematikan ruang gerak industri strategis dalam alih teknologi maupun pemasarannya. Sebab, biar bagaimanapun, rejim global industri pertahanan masih dikuasai oleh AS dan sekutunya.

Ketiga, sebagai negara demokrasi baru, Indonesia dapat pula menegaskan akan pentingnya kontrol sipil atas militer. Dimana indikasi yang paling kentara adalah kontrol tersebut harus bersifat efektif, dan mampu memosisikan TNI untuk tidak lagi menggunakan pendekatan kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan. Hal yang mana dikuatirkan oleh banyak kalangan, terutama kalangan aktivis HAM.

Keempat, mengembangkan pola kerja sama yang efektif dengan sekutu AS lainnya, khususnya di Asia Tenggara dan Australia. Sekedar gambaran, problematika yang mengerucut dari ancaman keamanan di Asia Tenggara dan Australia adalah masalah pelintas batas negara (*human trafficking*), yang mana memosisikan Indonesia sebagai negara transit sebelum menuju Australia. Hal ini sesungguhnya dapat diminimalisir apabila efektifitas kerja sama juga terjalin erat antara militer Indonesia dengan militer di sejumlah negara Asia Tenggara, dan khususnya Australia.

Kelima, sebagai tentara profesional, TNI harus berupaya untuk mengembangkan kemampuan dalam mengamankan pulau terluar dan perbatasan, yang secara geopolitik merupakan pintu masuk untuk sejumlah ancaman keamanan non tradisional, seperti terorisme. Pengalaman Philipina dan Thailand harus menjadi pelajaran bagi TNI berkaitan dengan pemulihan kerja sama tersebut. kedua negara tersebut menjadi basis ancaman keamanan di Asia Tenggara, khususnya pada pengembangan solidaritas keagamaan yang semu yang bisa menjadi benih-benih terorisme.

Apalagi selama ini upaya Polri dengan Densus 88 AT-nya dianggap mampu melakukan akselerasi pemberantasan terorisme. Sehingga dapat dipahami apabila titik tekan awal pemulihan kerja sama militer ini ada pada Kopassus, yang dianggap memiliki daya jelajah yang lebih baik dalam mencegah masuknya aksi teror di Indonesia, melalui jalur perbatasan dan pulau terluar tersebut.

Dengan mengacu pada lima keuntungan tersebut diatas, maka agaknya langkah untuk menolak pemulihan kerja sama militer tersebut harus dikaji kembali. Bahwa masih terdapat pelanggaran dan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI adalah bagian dari proses memperbaiki diri. Dan dalam konteks tersebut, publik telah cukup aktif dalam meminimalisir pelanggaran dan penggunaan kekerasan TNI.